

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

BZN, Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat. Terjemahan K.Ng. Soebakti Poesponoto*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramitha, 1981).

Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, (Jakarta : Djambatan).

_____, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Edisi Revisi (Jakarta : Djambatan 2003).

Pudjasewojo, Kusumadi, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Aksara Baru, 1976).

Parlindungan, A.P., *Berakhirnya Hak-Hak Atas Tanah (Menurut Sistem UUPA)*. (Bandung : Mandar Maju, 1990).

Purnadi, Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, *Sendi-Sendi Hukum Agraria*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983).

Siong, Gouw Giok, *Tafsiran Undang-Undang pokok Agraria*, (Djakarta : Kenta, 1967).

Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1985).

Suhariningsih, *Tanah Terlantar, Asas dan Pembaharuan Konsep Menuju Penertiban*. (Jakarta : Prestasi Pusta Publisher, 2009).

Supriadi, *Hukum Agraria*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009).

Wiranata, I Gede, *Hukum Adat Indonesia, Perkembangannya dari Masa Ke Masa*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004).

2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, *Undang-Undang Pokok Agraria*, UU No. 5 Tahun 1960, L.N. No. 104 Tahun 1960, T.L.N. No. 2043.

_____, *Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar*, PP No. 11 Tahun 2010, L.N.R.I. No. 16. T.L.N.R.I. No. 5098.

_____, *Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar*.

_____, *Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar*.

3. SUMBER PENELITIAN/JURNAL ILMIAH/MAKALAH

Chalisah, Parlindungan, *Tanah Terlantar Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 36 Tahun 1998 Dan Permasalahan-Permasalahan Yang Terdapat di Lapangan* (Makalah Fakultas Hukum Bagian Hukum Administrasi Negara Universitas Sumatera Utara), Sumatera Utara.

Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat. *Kebijakan Pengendalian dan Pendayagunaan Tanah Terlantar*, Jakarta, 2004.

Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, *Laporan Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat Mengenai Inventarisasi dan Identifikasi Tanah-Tanah yang Diindikasikan Terlantar*, Jawa Barat, 2009.

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, *Resonansi Reforma Agraria, Pada Hari Agraria Tahun 2008*, (Yogyakarta : STPN 2009).

4. SUMBER INTERNET

“Akibat Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Kaitannya Dengan Pengaturan Tanah Terlantar”, http://eprints.undip.ac.id/24076/1/INDRA_ARDIANSYAH.pdf, diakses pada tanggal 18 Juni 2012.

“Tertibkan Tanah Terlantar”, <http://mazprie82tanah.blogspot.com/2010/12/tertibkan-tanah-terlantar.html>, diakses pada tanggal 18 Juni 2012.

“Tanah Terlantar Di Tengah Sorotan” <http://kawaraangi.blogspot.com/2010/10/tanah-terlantar-di-tengah-sorotan.html>, diakses tanggal 30 Agustus 2012.

5. KAMUS

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1994).

